

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BERAU**

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau 2018 dapat disusun dengan baik. LKj-IP Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam mengimplementasikan SAKIP yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Tujuan disusunnya LKj-IP agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau 2018 dapat tergambar dengan jelas sehingga dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja yang dicapai. Penyusunan LKj-IP 2018 memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu perwujudan transparansi dan akuntabilitas di lingkup Pemerintah.

Demikian LKj-IP ini dibuat, diharapkan semua pihak dapat memberikan koreksi dan masukan demi perbaikan penyusunan LKj-IP kedepan.

Tanjung Redeb, 3 Maret 2019

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Berau

DAVID PAMUJI, S. ST, M. Si

NI. 19770128 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	1
D. Sumber Daya Manusia	1
E. Pemasalahan Utama (Isu Strategis)	4

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis	6
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Indikator Kinerja Utama	10
D. Rencana Kinerja Tahunan	10
E. Perjanjian Kinerja	11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	12
2. Capaian Kinerja	13
3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	13
4. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan..	18
5. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun Terakhir	18
6. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai Dengan Tahun ini Denga Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam Dokumen Renstra ...	19
7. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional.....	19
8. Analisa Penyebab Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target Kinerja Sera Solusi Penyelesaiannya	19

9. Analisa atas efisiensi terhadap sumber daya	20
10. Analisa Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan atas pernyataan pencapaian kinerja	20
11. Realisasi Anggaran	21
BAB VII PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bab II Pasal 2 dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan bupati berau Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau per 31 Desember 2018 memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang terdiri dari 42 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbagi dari 18 (delapan belas) orang pejabat struktural, 24 (dua puluh empat) orang

pegawai non struktural dan 35 (tiga puluh lima) orang tenaga Honorer/honor bulanan lepas

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per 31 Desember 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Jumlah pegawai
1.	Sekretariat	18
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	26
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	15
4.	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	10
5.	Bidang Pengolahan informasi Adminintrasi Kependudukan	8
	Jumlah Keseluruhan	77

b. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai per 31 Desember 2018 berdasarkan pendidikan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	Jumlah
1.	Sekretariat		7		11		18
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	8	2	15		26
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil		6	2	7		15
4	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan		2	1	6	1	10
5	Bidang Pengolahan informasi Adminintrasi Kependudukan		2		6		8
	Jumlah Keseluruhan						77

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tabel 1.3
Jumlah pegawai per 31 Desember 2018 berdasarkan golongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat		3	7	1	11
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk		2	7		9
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil			8		8
4	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan		1	5	1	7
5	Bidang Pengolahan informasi Adminitrasi Kependudukan		2	4	1	7
		Jumlah Keseluruhan				42

c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai per 31 Desember berdasarkan jabatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Uraian	JFU	Eselon			Jumlah
			II	III	IV	
1.	Sekretariat	14		1	3	18
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	23			3	26
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	12			3	15
4	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	6		1	3	10
5	Bidang Pengolahan informasi Adminitrasi Kependudukan	4		1	3	8
	Jumlah	59		4	14	77

d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

Tabel 1.5
Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Pejabat memenuhi syarat kepangkatan	Jumlah jabatan yang ada
1	Sekretariat	4	5
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3	4
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	3	4
4	Bidang Pemanfaatan Data dan	4	4

	novasi Pelayanan		
5	Bidang Pengolahan informasi Adminitrasi Kependudukan	4	4
		18	21

e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim

Tabel 1.6
Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Pejabat yang telah melaksanakan Diklatpim	Jumlah jabatan yang ada
1	Sekretariat	4	5
2	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2	4
3	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	3	4
4	Bidang Pemanfaatan Data dan novasi Pelayanan	2	4
5	Bidang Pengolahan informasi Adminitrasi Kependudukan	4	4
		15	21

D. Permasalahan utama (isu strategis)

penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan encatatanbidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Berau secara berkesimbangan selalu dalam proses pembenahan dan perbaikan, namum upaya tersebut masih menyisahkan adanya pelayanan yang belum optimal.

Permasalahan yang dialami dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten berau adalah :

- ~ Kenyamanan pada ruang tunggu atau antrian, Dinas Kependudukan dan pencataan sipil kabupaten berau berhadap ditahun yang akan dating ruang pelayanan bisa dibangun lebih luas, sehingga dapat memberika rasa nyaman bukan hanya kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,namun juga terhadap aparatur yang melaksanakan tugas pelayanan.
- ~ Dukungan Tehnologi Informasi untuk mendukung proses pelayanan juga masih sangat minim.

- ~ Sumber Daya Manusia sebagai penggerak IT juga masih perlu untuk ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
- ~ Ketersediaan blanko KTP Elektronik yang terbatas,
- ~ Belum terwujudnyatehnologi informasi yang terintegrasi antara jenis layanan
- ~ Seiring dengan kemajuan transportasi antar wilayah perpindahan penduduk sering tidak diikuti dengan administrasi kependudukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau periode 2016-2021 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat Visi, misi, tujuan sasaran dan program yang akan ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan, yang merupakan serangkaian tindakan untuk di implementasikan oleh seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2.1.1. Visi dan Misi

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategik dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut.

No	Visi	Misi
1	Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan Pelayanan Prima.	a. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan dan operasional kantor yang mendukung sarana dan prasarana yang memadai. b. Memberikan motivasi dalam upaya meningkatkan disiplin kerja c. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil d. Mewujudkan pengelolaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

		<p>SKPD ke arah yang lebih baik.</p> <p>e. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang bermutu, merata dan terjangkau</p> <p>f. Mewujudkan sistem pengolahan data dan pelaporan kependudukan yang akurat dan berkualitas.</p>
--	--	---

a. **Visi**

Tertib administrasi kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan pelayanan prima mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Berau telah memiliki atau memegang seluruh dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdata dalam system database kependudukan secara nasional dengan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, cepat, ramah dan teliti.

b. **Misi**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menjabarkan kedalam beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan dan operasional kantor yang dukung sarana dan prasarana yang memadai.
- ✓ Memberikan motivasi dalam upaya meningkatkan disiplin kerja
- ✓ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia /Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- ✓ Mewujudkan pengelolaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD ke arah yang lebih baik.
- ✓ Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang bermutu, merata dan terjangkau

- ✓ Mewujudkan sistem pengolahan data dan pelaporan kependudukan yang akurat dan berkualitas.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

- a. Dalam penetapan Visi dan Misi ada tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

- ✓ Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
- ✓ Meningkatkan kinerja aparatur yang bersih dan berwibawa
- ✓ Meningkatkan kinerja aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil
- ✓ Meningkatkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
- ✓ Meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan
- ✓ Meningkatkan pelayanan dibidang pencatatan sipil
- ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk mendukung kualitas data dan pelaporan yang lebih akurat

- b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah :

- ✓ Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
- ✓ Meningkatnya kinerja aparatur yang bersih dan berwibawa
- ✓ Meningkatnya kinerja aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil
- ✓ Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
- ✓ Meningkatnya pelayanan dibidang kependudukan
- ✓ Meningkatnya pelayanan dibidang pencatatan sipil
- ✓ Meningkatnya sarana dan prasarana administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk mendukung kualitas data dan pelaporan yang lebih akurat

2.2.3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Kebijakan adalah merupakan suatu ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat. Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kabupaten Berau. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/kegiatan pembangunan daerah. Berikut strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Renstra tahun 2016-2021:

1. Strategi 1: Peningkatan Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Kabupaten Berau memiliki penduduk sebanyak 224.654 (2018) yang tersebar di 13 Kecamatan dimana letak geografik antara kecamatan satu dengan kecamatan lainnya relatif berjauhan, dengan kondisi alam yang masih sulit. Hal ini merupakan hambatan sekaligus tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, melalui pelayanan langsung ke masyarakat di Kecamatan, Kampung/Kelurahan dan sekolah-sekolah pada hari libur
- ❖ Pelimpahan sebagian pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan.

2. Strategi 2: Penguatan kapasitas kelembagaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memiliki kendala-kendala diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia sebagai penggerak roda kegiatan, serta dukungan sarana dan prasarana yang belum maksimal.

Namun demikian pelayanan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan tuntutan keadaan, dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kebijakan yaitu Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kelembagaan

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mempunyai tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tahun Pertama pelaksanaan RPJMD 2016-2020, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau menetapkan Indikator Kinerja Utama, Yaitu :

- a. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- b. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
- c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
- d. Cakupan Penerbitan Akta Kematian
- e. Sarana dan Prasarana mendukung SIAK

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2018, yang mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan catatan Sipil 2016-2020. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018.

(terlampir)

Pembangunan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti walaupun telah ditetapkan tujuan berikut indikator keberhasilannya apabila tidak didukung dengan strategi pencapaian tujuan yang tepat.

Maka dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan administrasi kependudukan di Kabupaten Berau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau telah menetapkan strategi pencapaian yang terdiri dari 4 (Empat) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan .

2.4. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, menyusun Penetapan Kinerja setelah menerima dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2018 dan ditanda tangani oleh Bupati Berau dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau . Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Pernyataan Penetapan Kinerja dan Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Tahun 2018. *(terlampir)*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Berau Nomor :700/119/itkab.ADM/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, memperoleh katagori **BB** dengan nilai **73.33** yang berarti **Sangat Baik** hal ini naik satu tingkat dibandingkan hasil laporan kinerja tahun 2016 yaitu B, namun demikian masih terdapat beberapa rekomendasi untuk dilakukan perbaikan kedepannya, yaitu :

- a. Dokumen rencana aksi atas kinerja yang telah disusun agar dilakukan monitoring terhadap pencapaiannya yang dituangkan dalam dokumen pelengkap terhadap dokumen rencana aksi, agar rencana aksidapat dimanfaatkan maksimal dalam pengarahannya dan pengorganisasian Kegiatan.
- b. Agar dibuat SOP mekanisme pengumpulan data, sehingga pengumpulan data kinerja dapat diandalkan.
- c. Mengumpulkan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara priodik (Bulanan/Triwulanan/semesteran) yang dituangkan didalam SOP Mekanisme Pengumpulan Data
- d. Mengembangkan tehnologi informasi mengenai pengukuran kinerja
- e. Melaksanakan Reviu secara berkala terhadap dokumen IKU yang dituangkan didalam dokumen pelengkap atas dokumen IKU
- f. Menyajikan analisa efisiensi penggunaan sumber daya didalam laporan kinerja
- g. Menyajikan informasi keuangan secara optimal yang terkait dengan pencapaian sasran kinerja
- h. Menyajikan perbandingan data kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, maupun pembanding lain yang diperlukan.
- i. Melakukan evaluasi rencana aksi, yang disajikan dalam dokumen pelengkap atas dokumen rencana aksi, dan menyampaikan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan

- j. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata yang disajikan pada dokumen pelengkap atas rencana aksi.

Dari semua rekomendasi yang telah disampaikan sebagian telah ditindak lanjuti, diharapkan untuk tahun depan ada peningkatan yang signifikan. Jawaban rekomendasi hasil evaluasi telah disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Berau dengan Nomor :700/ /CSBR-I/2019 tanggal 25 Maret 2019.(*terlampir*).

3.2. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penilaian keberhasilan atas penetapan kinerja dapat diperoleh dari realisasi kinerja disandingkan dengan target kinerja yang ingin dicapai dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai evaluasi dan kajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tingkat capaian dan analisa sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran capaian kinerja 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	persen	85	98.16
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	persen	90	100
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	persen	95	83.54
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	persen	90	100
		Sarana dan Prasarana mendukung SIAK	unit	2	100

3.3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian target atas indicator kinerja utama (IKU) Tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama presentase penerbitan Kartu Tanda penduduk (KTP) elektronik.

Pada table tersebut sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan encatatan Slpil Kabupaten Berau adalah Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan indicator kinerja

utama presentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum \text{Kartu KTP yang diterbitkan}}{\sum \text{Wajib KTP}} \times 100$$

Besaran jumlah KTP elektronik yang diterbitkan merupakan penjumlahan dari masyarakat yang telah memiliki KTP dengan membandingkan jumlah wajib ktp di Kabupaten Berau.

Berdasarkan data pembersihan semester II Tahun 2018 Jumlah KTP yang telah diterbitkan sebanyak 153.048 dari jumlah wajib KTP sebanyak 155.919 Jadi capaian penerbitan KTP elektronik sebesar **98.16%** mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan, yaitu 85 %. Peningkatan pencapaian target ini dikarenakan beberapa factor, yaitu :

- a. Adanya peningkatan dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat baik itu dilakukan di Kecamatan, Kampung, tempat keramaian bahkan di Sekolah-sekolah.
- b. Adanya aturan tentang kemudahan dalam kepengurusan KT elektronik, yaitu hanya membawa fotocopy Kartu Keluarga.
- c. Adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP

B. Indikator Kinerja Utama prosentase penerbitan Kartu Keluarga

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama, yang kedua yaitu Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK). Pelayanan kepengurusan Kartu Keluarga biasanya diiringi dengan kepengurusan KTP-el.

Kepengurusan Kartu Keluarga biasanya disebabkan :

1. Adanya penambahan Anggota Keluarga
2. Kartu Keluarga yang lama yang dikeluarkan kecamatan yang tidak berlaku lagi.
3. Adanya perpindahan/pengurangan anggota keluarga, yang disebabkan telah menikah atau meninggal dunia
4. Kartu Keluarga hilang

Untuk mengetahui cakupan penerbitan Kartu Keluarga Pada tahun 2018, menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Kartu Keluarga yang diterbitkan}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100$$

Sampai pada bulan Desember 2018, diketahui Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan sebanyak 75.558 dan Jumlah Kepala Keluarga 75.558 Maka berdasarkan data tersebut, diketahui cakupan penerbitan Kartu Keluarga tahun 2018 sebanyak **100%**. Hal ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 90%.

C. Indikator Kinerja Utama resentase penerbitan akta kelahiran

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja utama, yang ketiga yaitu Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran. Akta kelahiran diterbitkan karena adanya permohonan masyarakat yang dikatagorikan menjadi dua, yaitu kelahiran dalam satu tahun dan kelahiran diatas satu tahun. Yang artinya akta kelahiran dalam satu tahun dikeluarkan dalam kurun waktu tahun berjalan dari proses kelahiran. Dan kelahiran diatas satu tahun diartikan akta yang dikeluarkan setelah satu tahun dari proses kelahiran. Untuk menghitung Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Akta Kelahiran yang diterbitkan}}{\sum \text{Kelahiran yang terjadi}} \times 100$$

Sampai Desember tahun 2018 akta kelahiran yang diterbitkan usia 0-18 tahun sebanyak 71.159 dokumen sedangkan jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 84.750 dokumen . jadi capaian penerbitan akta anak sebesar atau **83.54%**. Dan secara keseluruhan akta kelahiran yang diterbitkan sebanyak 119.591 dokumen berasal dari dua sumber yaitu akta kelahiran diterbitkan usia 0-18 tahun dan akta kelahiran yang diterbitkan diatas 18 tahun .

Keberhasilan ini disebabkan karena:

1. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran, terutama untuk mendidikan anggota keluarga.
2. Persyaratan dalam kepengurusan yang relatif mudah.
3. Dalam proses penerbitannya tidak membutuhkan jaringan internet.
4. Telah dilakukan pelayanan langsung ke Kecamatan-kecamatan untuk meringankan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

D. Indikator Kinerja Utama resentase penerbitan akta kematian

Indikator Kinerja Utama ke empat adalah Cakupan penerbitan Akta Kematian. Akta kematian dikeluarkan setelah adanya permohonan dari masyarakat dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Untuk menghitung cakupan penerbitan Akta Kematian adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Akta Kematian yang diterbitkan}}{\sum \text{Kematian yang terjadi}} \times 100$$

Sampai dengan berakhirnya tahun 2018, jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 1.873 dokumen dan jumlah kematian yang terjadi 1.873 dokumen. Dari data tersebut, maka diketahui cakupan penerbitan akta kematian sebesar **100%** .

F. Indikator Kinerja Utama Jumlah sarana pendukung SIAK

Indikator Kinerja Utama yang kelima adalah Sarana dan Prasarana pendukung SIAK.Sarana dan Prasarana SIAK sangat berperan dalam mendukung operasional pelaksanaan kepengurusan dokumen kependudukan.Dari 2 (dua) unit pendukung SIAK yang ditargetkan, terealisasi 2 unit atau **100%**. Hal ini sangat membantu dalam memperlancar proses kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Berau.

penilaian keberhasilan atas tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Berau Tahun 2018 diperoleh dari realisasi kinerja disandingkan dengan target 2018. Adapun program dan kegiatan pendukung dari keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

a. Kinerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Eningkatan elayanan public dibidang pendaftaran penduduk	Jumlah KTP yang diterbitkan	70.200 dok	61.492 dok
2	Pelayanan administrasi kependudukan (DAK)	Jumlah	6 Kec	6 Kec
3	Pengawasan dan pengendalian penduduk	Jumlah razia yustisi	2 kali	3 kali

b. Kinerja Bidang Inovasi pelayanan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan kerjasama lintas sektoral	Jumlah KS	3 KS	0
2	Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan	20 kali	20 kali
3	Publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah media data	13 kec	13 kec

c. Kinerja Bidang pencatatan sipil

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Peningkatan pelayanan dibidang pencatatan sipil	Jumlah akta kelahiran	8.000 dokumen	9.462 dokumen
2	Eningkatan pelayanan pencatatan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	Jumlah akta yang diterbitkan	500 dokumen	852 dokumen
3	Peningkatan pelayanan akta perkawinan dan perceraian	Jumlah akta perkawinan dan perceraian	300 dokumen	431 dokumen

d. Kinerja Bidang piak

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah Softwere	6 kec	6 kec
2	Peningkatan sarana dan prasarana SIAK Kabupaten	Jumlah sarana	2 unit	2 unit
3	Engembangan database kependudukan	Jumlah laporan penyisiran data	7 laporan	6 laporan

3.3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja atas indicator kinerja utama bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Target dan Realisasi 2018

No	Sasaran	Indikator Kinera	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	85	98.16
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	90	100
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	95	83.54
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	90	100
		Sarana dan Prasarana mendukung SIAK	2	100

3.3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2.
Perbandingan realisasi Tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Sasaran	Indikator Kinera	Realisasi		
			2016	2017	2018
	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	77.08	91.27	98.16
		Prosentase Penerbitan Kartu Keluarga	71.18	53.09	100
		Prosentase penerbitan Akta kelahiran	103	59.03	83.54
		Prosentase penerbitan Akta Kematian	99.32	100	100
		Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK	125	100	100

3.3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Uraian	Realisasi s/d 2018	Target RPMJD
1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	88.84	100
2	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	74.76	100
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99.77	90
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	108.33	70

3.3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Uraian	Realisasi 2018	TARGET (%) Nasional
1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	88.84	100
2	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	74.76	100
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	99.77	90
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	108.33	70

3.3.5. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan untuk mendapatkan sasaran yang diinginkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Analisa penyebab Keberhasilan

- ✓ Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya
- ✓ Semakin tumbuh kesadaran masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- ✓ Semakin bertambah pengetahuan masyarakat, bahwa dokumen kependudukan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipergunakan dalam kepengurusan yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintah.
- ✓ Adanya pelayanan jemput bola ke Kecamatan, Kampung, tempat keramaian dan sekolah-sekolah yang semakin meningkat.

- ✓ Terbangunnya inovasi pelayanan kependudukan yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan, misal pelayanan yang berbasis 3 in 1, 4 in 1 dan lain sebagainya.

B. Analisa penyebab kegagalan

- ✓ Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan perpindahan penduduk yang tidak diiringi dengan dokumen kependudukan
- ✓ Masih terbatasnya sarana pendukung proses kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- ✓ Masih kurangnya tenaga operator dalam pengoperasian SIAK
- ✓ Pelayanan langsung jemput bola di kecamatan, kelurahan, tempat keramaian dan sekolah masih bersifat pelayanan offline.

C. Dalam penyelesaian permasalahan yang timbul ada beberapa langkah yang telah dilaksanakan :

- ✓ Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil .
- ✓ Memaksimalkan fungsi sarana SIAK yang ada
- ✓ Melakukan Save data pelayanan Langsung dan selanjutnya dikerjakan penyelesaian diluar jam kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.3.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Berau pada tahun 2018 memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 10.165.688.200,- anggaran tersebut terdiri dari Belanja langsung sebesar Rp 4.829.300.000 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.336.388.200

Untuk Belanja langsung sebesar Rp. 4.829.300.000 teralisasi sebesar Rp. 4.374.866.008 atau 90.59%. sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.336.388.200 terealisasi Rp. 5.022.470.267 atau 94.12 %

3.3.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 melaksanakan 4 Program Kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Penataan Administrasi Kependudukan

Dari 4 (empat) program tersebut, hanya program penataan administrasi kependudukan yang merupakan program prioritas RJMD yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian target dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Sementara 3 program lainnya merupakan program rutinitas yang tidak termasuk dalam program prioritas RJMD Kabupaten Berau.

3.4. Realisasi Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.165.688.200,-. Dengan realisasi sebesar 9.397.336.275 atau 92.44 %.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan berserta capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp. 2.621.207.000 dengan capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 2.449.764.791 dengan persentase 93.46%, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal dinas dengan sasaran

strategis tersedianya data pegawai dan data aset. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal dinas yang dapat dilihat pada tabel 2.4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		capaian (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	500.000	497.000	99.40	100	78	78
2	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	199.550.000	171.770.707	86.08	12	12	100
3	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	177.623.000	141.876.917	79.88	17	17	100
4	Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	106.038.000	81.964.600	77.30	15	15	100
5	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	3.110.000	3.110.000	100	12	12	100
6	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	33.642.000	13.306.000	39.55	18	18	100
7	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	513.629.000	504.023.285	98.13	73	73	100
8	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.500.000	14.784.800	84.48	10	10	100
9	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.000.000	16.775.000	98.68	16	16	100
10	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	176.175.000	162.196.000	92.07	8	8	100
11	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	15.468.000	77.34	200	216	108
12	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	170.000.000	169.811.082	99.89	45	23	51
13	Kegiatan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	85.000.000	84.860.000	99.84	60	82	136
14	Kegiatan penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran	1.101.440.000	1.069.321.400	97.08	34	35	108

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 22.787.838 dengan persentase 91.15% yang bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Presentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal.

Tabel 2.4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		capaian
		Target	Realisai	(%)	Target	Realisai	(%)
1	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	22.787.838	91.15	2	2	100

3. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.928.000 dengan persentase 74.64%, yang bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan, perencanaan program, pelaporan dengan output yang dihasilkan terdiri dari 5 dokumen, yaitu Renja 2019, Lakip, Lap Keuangan dan IKM.

Tabel 2.6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keluaran		capaian
		Target	Realisai	(%)	Target	Realisai	(%)
1	Kegiatan penyusunan dokukemn perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	20.000.000	14.928.000	74.64	5	5	100

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan merupakan program strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.670.181.200 dan terealisasi 2.534.989.638 atau 94.94%. Dalam program penataan administrasi kependudukan didalamnya terdapat 12 (duabelas) kegiatan.. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.6
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018

No	Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)	Keluaran		capaian (%)
		Target	Realisai		Target	Realisai	
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).	107.000.000	96.752.432	90.42	6	6	100
2	Kegiatan peningkatan pelayanan public di bidang pendaftaran penduduk	610.000.000	573.188.623	93.97	71.000	61.492	86
3	Kegiatan pengembangan database kependudukan	109.143.200	102.821.925	94.21	6	6	100
4	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.014.378.000	968.898.292	95.52	24	24	100
5	Kegiatan peningkatan pelayanan di bidang pencatatan sipil	263.100.000	260.050.000	98.84	7.650	6.462	84
6	Kegiatan pengawasan dan pengendalian penduduk	138.260.000	135.564.564	98.05	2	3	150
7	Kegiatan peningkatan pelayanan akta perkawinan dan perceraian	75.000.000	70.424.000	93.90	200	431	215
8	Kegiatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	95.000.000	88.780.500	93.45	24	24	100
9	Kegiatan peningkatan pelayanan pencatatan akta perubahan status	98.300.000	97.250.000	98.93	404	852	210

	anak, pewarganegaraan dan kematian						
10	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SIAK Kabupaten	50.000.000	49.113.281	98.23	2	2	100
11	Kegiatan peningkatan kerjasama lintas sektoral pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	60.000.000	42.877.321	71.46	5	0	0
12	Kegiatan publikasi data kependudukan dan pencatatan sipil	50.000.000	49.268.700	98.54	5	5	100
		2.670.181.200	2.534.989.638	94.94			

Tabel 2. 7
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
1.	Gaji Pokok PNS	2.032.350.000	1.917.101.000	82.51
2.	Tunjangan Keluarga	222.900.000	216.381.078	97.08
3.	Tunjangan Jabatan	196.400.000	173.400.000	88.29
4.	Tunjangan Fungsional Umum	59.400.000	57.380.000	96.60
5.	Tunjangan Beras	135.800.000	115.365.060	84.95
6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.900.000	2.846.843	72.99
7.	Pembulatan Gaji	50.000	30.243	60.49
8.	Iuran BPJS Kesehatan	63.300.000	54.018.946	85.34
9.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	20.200.000	10.931.838	54.12
10.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya	2.095.000.000	1.827.411.000	87.23
	Jumlah	4.829.300.000	4.374.866.008	90.59

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dalam Tahun 2018 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj-IP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik .

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Berau pada tahun 2018 telah berhasil dengan baik melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Capaian kinerja program penataan administrasi kependudukan yang merupakan program prioritas RJMD Kabupaten Berau telah mencapai 98.16% persen lebih besar dari pada target sebesar 85%.

Namun demikian Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil terus berbenah baik dalam hal pelayanan maupun dalam hal penyederhaan prosedur . Inovasi pelayanan terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Berau memiliki tujuan utama terpenuhinya dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Berau. Mengacu pada tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai meningkatnya pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta terpenuhinya hal dasar masyarakat.

Pada tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau telah melaksanakan 4 (empat Program) dan 28 (dua puluh delapan) Kegiatan, dengan didukung anggaran sebesar Rp. 10.165.688.200,- (sepuluh juta seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 9.397.336.275 atau 92.44%

Berdasarkan telaahan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Presentase Penerbitan KTP elektronik sebesar 98.16%
2. Presentase Penerbitan Kartu keluarga sebesar 100 %
3. Presentase Penerbitan Akta Kelahiran sebesar 83.54%
4. Presentase Penerbitan Akta kematian sebesar 100%
5. Presentase Sarana Prasarana Pendukung SIAK sebesar 100%